



SISTEM EKONOMI INDONESIA

AIDIL AKBAR, M.PD

SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. Tujuan pembelajaran

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis sistem ekonomi di Indonesia
2. Mahasiswa mampu mengevaluasi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia
3. Mahasiswa mampu menggambarkan permasalahan ekonomi kontemporer di Indonesia
4. Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi atau solusi untuk perbaikan sistem ekonomi di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Sistem Ekonomi di Indonesia

1.1 Definisi Sistem Ekonomi

Untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang mendasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, setiap komunitas memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan sistem ekonomi yang mereka anut. Pendekatan komunitas dalam mengelola aspek ekonomi ini disebut sebagai sistem ekonomi atau tata ekonomi. Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan lembaga ekonomi yang digunakan oleh suatu negara atau bangsa untuk mengatur aktivitas ekonomi mereka. Lembaga ekonomi ini mencakup panduan, peraturan, dan norma-norma yang digunakan oleh masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi.

Beberapa lembaga ekonomi bersifat tertulis, seperti hukum, peraturan pemerintah, atau instruksi presiden, sementara yang lainnya bersifat tidak tertulis, seperti kebiasaan, adat-istiadat, atau praktik yang umumnya diikuti oleh masyarakat dalam urusan ekonomi. Perangkat kelembagaan ini mencakup proses operasional, mekanisme hukum, peraturan ekonomi, dan norma sosial yang tercatat maupun yang tidak tertulis, yang semuanya terkait dengan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi merupakan bagian integral dari ideologi sosial suatu negara atau bangsa. Setiap sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara memiliki karakteristik khasnya sendiri. Untuk membedakannya dari sistem ekonomi negara lain, kita dapat melihat dari sudut pandang yang melibatkan:

1. Kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
2. Tingkat kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam bersaing satu sama lain.
3. Peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi.

1.2 Jenis-jenis Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Sosialis adalah konsep yang muncul sebagai respons terhadap kelemahan-kelemahan dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi sosialis, sebagian besar faktor produksi, seperti modal dan alat produksi, dimiliki dan dioperasikan oleh negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Berbeda dengan pandangan kapitalisme yang menekankan

individualisme, sosialisme menekankan kolektivisme. Kolektivisme mengajarkan bahwa masyarakat secara kolektif memiliki kepentingan yang harus diutamakan sebelum kepentingan individu.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis meliputi:

1. Milik negara atas alat produksi seperti tanah, mesin, dan pabrik, tanpa ada kepemilikan pribadi atas alat-alat tersebut.
2. Seluruh kegiatan produksi dijalankan oleh sektor publik, tanpa adanya usaha swasta, yang berarti semua perusahaan adalah milik negara.
3. Penentuan jumlah dan jenis barang yang diproduksi diatur oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk oleh pemerintah.
4. Harga dan distribusi barang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.
5. Semua warga masyarakat adalah tenaga kerja yang wajib berkontribusi dalam produksi sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka menerima upah atau gaji dari negara sesuai dengan kebutuhan mereka.

Contoh praktik sistem ekonomi sosialis dapat ditemukan dalam negara-negara seperti Uni Soviet pada masa lalu, di mana sebagian besar sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah dan tidak ada kepemilikan swasta yang signifikan. Pada sistem ini, negara memainkan peran utama dalam menentukan apa yang diproduksi, seberapa banyak, dan bagaimana distribusinya. Meskipun model ini memiliki kelebihan seperti pemerataan ekonomi, juga memiliki kekurangan seperti kurangnya insentif individu dan inefisiensi dalam alokasi sumber daya.

Sistem ekonomi ini dipraktikkan di negara-negara komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi. Karena itu, sistem ini sering juga disebut ekonomi komando (command economy) atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat. Sekalipun sistem ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan, namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan kurangnya dorongan untuk bekerja secara produktif.

1.2.1 Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mana produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa diatur oleh pasar bebas dan didasarkan pada kepemilikan swasta atas sumber daya ekonomi. Dalam sistem ini, keputusan ekonomi utama seperti apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang akan diproduksi, dan harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan.

Berikut adalah beberapa ciri utama dari sistem ekonomi kapitalis:

1. **Kepemilikan Swasta:** Sumber daya ekonomi seperti tanah, modal, perusahaan, dan alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Ini berarti individu atau perusahaan dapat memiliki dan mengendalikan bisnis mereka sendiri.

2. Mekanisme Pasar: Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan suatu barang atau jasa tinggi dan pasokannya rendah, harga akan naik, dan sebaliknya.
3. Kebebasan Berusaha: Individu atau perusahaan memiliki kebebasan untuk membuka bisnis, menginvestasikan modal mereka, dan bersaing di pasar. Ini mendorong inovasi dan persaingan dalam ekonomi.
4. Keuntungan: Maksimisasi keuntungan adalah tujuan utama perusahaan dalam sistem kapitalis. Perusahaan berusaha untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
5. Konsumen sebagai Pembuat Keputusan: Konsumen memiliki kekuatan dalam menentukan apa yang akan diproduksi melalui preferensi dan pembelian mereka. Permintaan konsumen berperan penting dalam mengarahkan produksi.
6. Terdapat Klasifikasi Sosial: Sistem kapitalis seringkali menciptakan kesenjangan ekonomi di mana beberapa individu atau perusahaan mungkin jauh lebih kaya daripada yang lain. Ini menciptakan berbagai kelas sosial dan ekonomi.

Contoh Sistem Ekonomi Kapitalis:

1. Amerika Serikat: Amerika Serikat adalah salah satu contoh sistem ekonomi kapitalis yang kuat. Di sini, mayoritas perusahaan dan bisnis dimiliki secara pribadi, dan pasar bebas memainkan peran penting dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya.
2. Inggris: Inggris adalah contoh negara dengan sistem ekonomi kapitalis yang mapan. Ini mencakup kepemilikan swasta, kebebasan berusaha, dan pasar yang kuat.
3. Jerman: Jerman adalah contoh negara dengan sistem ekonomi kapitalis yang juga memiliki campuran elemen sosialisme. Di Jerman, ada fokus pada kesejahteraan sosial, dan serikat pekerja memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sistem ekonomi kapitalis dapat bervariasi dalam berbagai negara dan wilayah, tergantung pada tingkat regulasi pemerintah, tingkat kesejahteraan sosial, dan struktur kepemilikan sumber daya ekonomi.

Berikut adalah beberapa karakteristik tambahan dari sistem ekonomi kapitalis:

- a) Mekanisme Hukum Pasar: Sistem kapitalis mengandalkan hukum pasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran, untuk mengalokasikan sumber daya. Hukum ini beroperasi tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan. Namun, seringkali ada regulasi pemerintah yang mengatur pasar, seperti perlindungan konsumen dan aturan anti-monopoli.
- b) Investasi Modal: Dalam sistem kapitalis, investasi modal (uang yang diinvestasikan dalam produksi barang dan jasa) merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemilik modal berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari investasi mereka.

- c) Inovasi dan Efisiensi: Sistem kapitalis mendorong inovasi karena perusahaan bersaing untuk meningkatkan produk dan layanan mereka guna memenangkan pangsa pasar. Efisiensi dalam produksi dan alokasi sumber daya juga menjadi fokus penting.
- d) Kebebasan Memilih Pekerjaan: Individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan atau karier yang mereka inginkan. Mereka tidak terikat pada pekerjaan tertentu dan dapat mencari peluang yang lebih baik.
- e) Fluktuasi Ekonomi: Sistem kapitalis sering mengalami fluktuasi ekonomi, termasuk siklus konjungtur (periode ekspansi dan kontraksi ekonomi). Pemerintah biasanya mencoba mengendalikan fluktuasi ini melalui kebijakan moneter dan fiskal.
- f) Kewirausahaan: Kewirausahaan sangat didorong dalam sistem kapitalis. Individu yang memiliki ide-ide baru dan berani mengambil risiko dapat mendirikan bisnis mereka sendiri dan berpotensi sukses.

Contoh lain dari negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis meliputi Kanada, Australia, dan Singapura. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam praktiknya, banyak negara menerapkan campuran elemen kapitalis dan sosialis dalam sistem ekonominya, menciptakan sistem ekonomi yang disebut sebagai ekonomi campuran. Dalam ekonomi campuran, pemerintah biasanya terlibat dalam beberapa aspek ekonomi untuk mengimbangi ketidakseimbangan pasar dan mencapai tujuan sosial serta ekonomi.

1.2.2 Sistem Ekonomi Campuran

Kenyataannya, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak ada yang murni; yang ada adalah bentuk campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi sektor swasta tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan campuran ini dapat bervariasi dalam tingkat kapitalisme dan sosialisme yang diaplikasikan oleh setiap negara.

Contohnya, Amerika Serikat adalah contoh negara dengan kadar kapitalisme yang lebih tinggi dalam sistem ekonomi campuran. Di sana, sebagian besar sektor ekonomi dijalankan oleh swasta, dan campur tangan pemerintah cenderung lebih terbatas. Hongkong dan Singapura juga merupakan contoh negara dengan pendekatan yang sangat liberal terhadap ekonomi, yang menciptakan indeks kebebasan ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, India memiliki bobot sosialisme yang lebih besar dalam sistem ekonomi campurannya. Pemerintah India memiliki campur tangan yang lebih besar dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Indeks kebebasan ekonomi, seperti yang dikembangkan oleh Milton Friedman dan Economic Freedom Network, digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu negara mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi liberal. Skala indeks ini berkisar dari 0 hingga 10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang kuat dengan sistem ekonomi liberal. Contoh negara dengan indeks kebebasan ekonomi yang tinggi adalah Hongkong (9,3), Singapura (8,2), Selandia Baru (8,0), dan Amerika Serikat (7,6). Di

tingkat ASEAN, Thailand (7,2), Filipina (7,0), Malaysia (7,0), dan Indonesia (6,3) juga mencerminkan tingkat kebebasan ekonomi yang berbeda.

Studi menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kebebasan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi liberal cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sebagai contoh, negara-negara dengan perekonomian yang sangat bebas memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang kurang bebas atau sangat kurang bebas secara ekonomi.

Secara umum, keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk:

1. **Membuat peraturan:** Pemerintah membuat peraturan dengan tujuan utama untuk mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi agar berjalan dengan lancar dan tidak merugikan masyarakat. Contohnya, pemerintah menetapkan peraturan mengenai upah minimum untuk memastikan pekerja menerima upah yang layak. Selain itu, peraturan mengenai lokasi pengembangan industri dibuat untuk menghindari pencemaran lingkungan.
2. **Kebijakan ekonomi:** Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal (terkait dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah) dan moneter (terkait dengan uang dan perbankan). Ini dilakukan untuk mengatur kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan ekonomi.
3. **Operasi langsung:** Pemerintah juga terlibat secara langsung dalam beberapa kegiatan ekonomi dengan maksud memaksimalkan keuntungan sosial. Meskipun individu atau perusahaan swasta dapat mencapai keuntungan pribadi yang besar dalam kegiatan ekonomi mereka, tidak selalu berarti masyarakat secara keseluruhan akan mendapatkan keuntungan. Dalam kasus ini, pemerintah dapat terlibat secara langsung dengan mendirikan perusahaan negara dalam bidang-bidang yang vital dan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat.

Contoh konkret dari ketiga bentuk keterlibatan pemerintah ini adalah:

1. **Peraturan:** Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur pembayaran upah minimum bagi pekerja di sektor formal. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.
2. **Kebijakan ekonomi:** Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal, seperti menurunkan pajak, untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan moneter, seperti mengatur tingkat suku bunga, untuk mengendalikan inflasi.
3. **Operasi langsung:** Pemerintah mendirikan perusahaan negara yang mengelola infrastruktur vital seperti jalan tol atau penyediaan air minum. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan tersebut tersedia secara merata dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dapat bervariasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat serta kondisi ekonomi suatu negara.

1.3 Sistem Ekonomi Indonesia

1.3.1 Sistem Ekonomi Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Konsep Sistem Ekonomi Pancasila mulai mendapatkan perhatian serius sejak Seminar Nasional yang diadakan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980. Polemik yang hangat mengenai sistem ekonomi Indonesia pada sekitar tahun 1980-81 sebagian besar berkaitan dengan gagasan Mubyarto tentang Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sebutan SEP sebenarnya telah diperkenalkan oleh Emil Salim dalam sebuah artikel yang diterbitkan di harian Kompas pada tanggal 30 Juni 1966.

Buku berjudul "Membangun Sistem Ekonomi" yang ditulis oleh seorang guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (FE UGM), Mubyarto, sekali lagi menggarisbawahi konsistensinya dalam memperkenalkan dan mempopulerkan sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dalam kelompok pelopor SEP, terdapat dua pendekatan utama.

- a. Pendekatan Yuridis Formal: Pendekatan ini berasumsi bahwa dasar hukum SEP dapat ditemukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang diperkuat oleh semangat Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi dengan Pasal 23, 27 ayat 2, 34, serta penjelasan Pasal 2 UUD 1945. Pelopor dari pendekatan ini termasuk Sri-Edi Swasono dan Potan Arif Harahap.
- b. Pendekatan Berorientasi pada Sila-Sila Pancasila: Pendekatan ini menghubungkan SEP dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam pendekatan ini adalah Emil Salim, Mubyarto, dan Sumitro Djojohadikusumo. Mereka pada dasarnya memandang SEP sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada sila-sila I, II, III, IV, dan V Pancasila.

Secara keseluruhan, ketiga tokoh ini berusaha untuk mengartikulasikan ideologi Pancasila ke dalam konteks ekonomi dan bisnis. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang terbuka, yang berarti nilai-nilai dasarnya tetap, tetapi implementasinya dapat berkembang secara kreatif dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Contoh implementasi dari Sistem Ekonomi Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Salah satu contohnya adalah program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, seperti koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Relevansi Ekonomi Pancasila dapat diamati melalui tiga konteks yang berhubungan:

- a. Cita-cita ideal para pendiri bangsa;
- b. Praktik ekonomi rakyat;
- c. Praktik ekonomi aktual yang cenderung berorientasi pada paham liberal, individualis, dan kapitalistik.

Ekonomi Pancasila memiliki relevansi sebagai platform untuk memahami adopsi paham dan moral ekonomi yang memiliki ciri neo-liberal kapitalistik di Indonesia. Ekonomi Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral dalam bidang ekonomi yang

bersumber dari etika dan falsafah Pancasila. Selain mencerminkan visi keadilan sosial yang ideal, sistem ini juga mencerminkan realitas sosio-kultural ekonomi masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi panduan sejarah untuk menghindari jatuh ke dalam ideologi liberalisme dan kapitalisme. Ekonomi Pancasila merupakan prinsip-prinsip moral (ideologi) ekonomi yang diderivasikan dari etika dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu selain berisi cita-cita visioner terwujudnya keadilan sosial, ia juga mengangkat realitas sosio-kultur ekonomi rakyat Indonesia.

1.3.2 Sistem Ekonomi Demokrasi

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, terdapat sejumlah konsep yang harus dipahami secara individu maupun bersama-sama (Asshiddiqie, 2010). Konsep-konsep tersebut mencakup bahwa perekonomian Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang melibatkan:

1. Kebersamaan: Kolaborasi dan kesepakatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kepentingan bersama.
2. Efisiensi-Berkeadilan: Memastikan bahwa perekonomian berjalan efisien sambil tetap menjaga keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan.
3. Berkelanjutan: Mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi.
4. Berwawasan Lingkungan: Menghormati dan melindungi lingkungan alam dalam aktivitas ekonomi.
5. Kemandirian: Mengupayakan kemandirian ekonomi nasional tanpa ketergantungan penuh pada impor dan modal asing.
6. Keseimbangan Kemajuan: Membangun sektor-sektor ekonomi secara seimbang agar tidak ada yang tertinggal dalam pertumbuhan.
7. Kesatuan Ekonomi Nasional: Memastikan kesatuan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara bersama, tujuan adalah agar ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh pesat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bersaing secara global tanpa ketergantungan pada impor dan modal asing, serta menjaga lingkungan dan kesatuan bangsa.

Untuk memberikan contoh nyata, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan sektor-sektor yang mendukung prinsip-prinsip ini, seperti menggalakkan industri dalam negeri, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih mandiri, dan mengatur regulasi lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem yang penting. Selain itu, upaya-upaya terus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih adil.

1.3.3 Sistem Ekonomi Komando/Terpimpin

Dalam kenyataannya, sistem ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak era Orde Baru. Perubahan ini mencerminkan pergeseran menuju model ekonomi yang lebih kapitalis, yang sangat berbeda dengan masa Orde Lama atau masa pemerintahan Soekarno. Soekarno, sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia, sangat skeptis terhadap pemikiran Barat,

termasuk sistem ekonomi liberal/kapitalisme. Baginya, sistem kapitalisme-liberalisme yang diterapkan selama penjajahan Belanda telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, dan ia menganggap bahwa aliran ini harus dihindari dan dikeluarkan dari Indonesia. Soekarno bahkan memandang bahwa untuk melawan atau seimbangkan dominasi ekonomi Barat yang berlandaskan kapitalisme-liberalisme, Indonesia harus mengadopsi pemikiran dari Marhaenisme, yang memiliki akar dalam Marxisme.

Meskipun pada tahun 1959, konstitusi menolak secara resmi sistem kapitalisme-liberalisme dengan mengadopsi kembali UUD 1945 sebagai dasar ekonomi nasional, pada kenyataannya, Soekarno menerapkan sistem ekonomi komando yang mirip dengan yang diterapkan di negara-negara komunis seperti Uni Soviet (sekarang Rusia), negara-negara Eropa Timur (sekarang dikenal sebagai negara-negara transisi), dan Tiongkok. Dalam sistem ini, semua rencana dan keputusan terkait dengan pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industri yang akan dikembangkan, ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat (Tambunan, 2006).

Sebagai contoh nyata, dalam era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung model ekonomi pasar yang lebih terbuka dan kapitalis. Ini termasuk kebijakan deregulasi ekonomi, privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, dan penarikan investasi asing. Perubahan ini membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan isu-isu terkait ketidaksetaraan sosial dan dampak lingkungan.

Salah satu tindakan paling terkenal yang diambil oleh Soekarno, yang berdampak buruk pada kinerja perekonomian Indonesia selama era Orde Lama, adalah pengenalan konsep "Ekonomi Terpimpin" pada tahun 1957. Konsep ini memperkuat lebih lanjut sistem ekonomi komando yang telah ada, dan selama periode 1957-1958, terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Pengenalan ekonomi terpimpin membuat politik dan ekonomi Indonesia semakin mendekati model sosialis-komunis. Meskipun ideologi resmi Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet dan Tiongkok pada saat itu sangat kuat. Penting untuk dicatat bahwa pilihan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengadopsi elemen-elemen berbau komunis adalah refleksi dari perasaan anti-kolonialisasi, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme pada waktu itu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Soekarno meyakini bahwa pemikiran Marxis adalah senjata yang efektif untuk melawan kapitalisme. Pada masa itu, prinsip-prinsip seperti individualisme, persaingan bebas, dan kepemilikan perusahaan swasta sangat dikecam karena dianggap terkait erat dengan kapitalisme. Hal ini membuat Indonesia kesulitan mendapatkan dukungan keuangan dari negara-negara Barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun investasi modal asing (PMA), sementara untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan lebih lanjut, Indonesia membutuhkan dana yang besar.

Sistem ekonomi komando/terpimpin yang diterapkan di Indonesia selama era Soekarno didasarkan pada berbagai prinsip dan kebijakan ekonomi yang lebih menekankan peran dominan pemerintah dalam mengendalikan sektor-sektor kunci ekonomi. Beberapa prinsip utama sistem ekonomi ini adalah:

1. Nasionalisasi Industri: Salah satu tindakan utama yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno adalah nasionalisasi perusahaan asing, terutama perusahaan-perusahaan Belanda, dalam berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, dan industri. Tindakan nasionalisasi ini bertujuan untuk mengambil alih kontrol ekonomi dari pihak asing dan mengubah kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi milik negara atau masyarakat Indonesia.
2. Perencanaan Sentral: Pemerintah mengambil peran sentral dalam merencanakan dan mengkoordinasikan aktivitas ekonomi nasional. Perencanaan ini mencakup alokasi sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan penentuan prioritas sektor ekonomi yang harus dikembangkan.
3. Pembentukan BUMN: Pemerintah mendirikan banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, transportasi, dan energi. BUMN bertujuan untuk mengelola industri-industri kunci dan meningkatkan kendali negara terhadap ekonomi.
4. Sistem Harga dan Subsidi: Pemerintah mengatur harga-harga komoditas penting, seperti beras dan minyak tanah, dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi untuk barang-barang tertentu guna membantu masyarakat yang kurang mampu.
5. Fokus pada Keadilan Sosial: Prinsip-prinsip Pancasila, termasuk keadilan sosial, menjadi pedoman dalam merancang kebijakan ekonomi. Pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.
6. Pengaruh Ideologi Marxis: Dalam beberapa kebijakan dan retorika, pengaruh pemikiran Marxis sangat terasa. Pemerintah Soekarno melihat pemikiran Marxis sebagai alat untuk melawan pengaruh kapitalisme asing dan mendukung nasionalisme.
7. Sentralisasi dan Kontrol Pemerintah: Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas sumber daya ekonomi nasional, dan otoritasnya kuat dalam mengambil keputusan terkait ekonomi. Pemerintah juga memiliki peran besar dalam alokasi sumber daya dan investasi.

Penerapan sistem ekonomi komando/terpimpin ini memiliki dampak yang signifikan pada struktur ekonomi Indonesia saat itu. Misalnya, nasionalisasi perusahaan asing mengubah pemilik dan pengelolaan banyak industri penting, termasuk perkebunan dan pertambangan. Keputusan-keputusan ekonomi yang sentralisasi sering kali memiliki konsekuensi jangka panjang bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

Selama era Soekarno, terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda seperti Royal Dutch Shell (yang menjadi Pertamina) dan perusahaan perkebunan besar seperti Perkebunan Nusantara. Selain itu, pemerintah mendirikan BUMN seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Garuda Indonesia. Semua ini adalah contoh konkret dari implementasi sistem ekonomi komando/terpimpin yang bertujuan untuk mengendalikan sektor-sektor penting dalam ekonomi nasional.

1.3.4 Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Pada masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, terjadi perubahan besar dalam sistem ekonomi Indonesia. Berbeda dengan pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto mengadopsi paradigma pembangunan ekonomi yang lebih condong ke arah penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi). Selain itu, politik ekonomi diarahkan pada upaya menghidupkan kembali sektor ekonomi yang terhenti.

Pemerintahan Orde Baru juga memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat dan menjauhkan diri dari pengaruh ideologi komunis. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang sebelumnya hubungannya terputus pada masa Soekarno.

Peningkatan hubungan dengan lembaga donor internasional memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan pinjaman guna mendukung belanja pemerintah dan membiayai defisit anggaran. Sumber dana pinjaman berasal dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Belanda.

Langkah-langkah perubahan yang drastis yang diambil oleh Soeharto pada masa Orde Baru mencakup pengembalian ekonomi pasar, peningkatan perhatian terhadap sektor ekonomi, dan pendekatan yang lebih mendekati negara-negara Barat. Upaya-upaya ini menandai perubahan besar dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia selama periode tersebut.

Contoh konkret dari implementasi kebijakan ekonomi pasar bebas di era Orde Baru adalah program deregulasi dan liberalisasi ekonomi yang membuka pintu bagi investasi asing, serta privatisasi beberapa perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Hal ini mendorong pertumbuhan sektor swasta dan investasi asing langsung di Indonesia. Selama era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan signifikan, yang tercatat dalam laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, ada pula kontroversi terkait dengan tingkat korupsi dan ketidaksetaraan ekonomi selama periode ini.

Soeharto mencari dukungan dari negara-negara Barat, termasuk lembaga donor seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), dengan tujuan untuk menarik investasi mereka. Soeharto merasa bahwa bantuan dari negara-negara Timur tidak akan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi Indonesia pada saat itu.

Pada awal pemerintahan Soeharto, ada serangkaian langkah strategis yang diambil oleh pemerintah yang menandai perubahan cepat dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonomi pasar di Indonesia. Salah satu tindakan penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi selama era Orde Baru adalah pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Kedua undang-undang ini memberikan insentif bagi investor asing dan dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah urusan yang terkait dengan perekonomian dan investasi. Pada saat yang

bersamaan, beberapa perusahaan yang dinasionalisasikan selama era Orde Lama dikembalikan kepada pemilik aslinya.

Contoh implementasi kebijakan ini adalah peningkatan minat investor asing di Indonesia. Selama era Orde Baru, banyak perusahaan multinasional menginvestasikan modalnya di Indonesia, terutama dalam sektor industri, pertambangan, dan manufaktur. Hal ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun juga menimbulkan kontroversi terkait dengan isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi diarahkan dan dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dimulai dengan Repelita I pada tahun 1969-1974. Fokus utama dalam Repelita I adalah pembangunan sektor pertanian dan industri-industri terkait, seperti industri agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi Repelita I berpusat pada pengembangan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa melalui ekspor dan menggantikan impor, industri-industri yang memproses bahan baku yang ada di Indonesia, industri-industri padat karya, serta yang mendukung perkembangan regional. Selain itu, industri-industri dasar seperti produksi pupuk, semen, bahan kimia dasar, kertas, dan tekstil juga menjadi fokus.

Sebelum Repelita dimulai, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini melibatkan penanganan masalah tingkat inflasi yang tinggi, yang bahkan mencapai lebih dari 500% menjelang akhir masa pemerintahan Soekarno. Pemerintah juga berusaha mengurangi defisit anggaran yang besar selama masa Orde Lama dan menghidupkan kembali produksi barang-barang pokok yang mengalami stagnasi pada periode tersebut.

Contoh dari implementasi Repelita I adalah pengembangan industri-industri seperti tekstil, yang kemudian menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Selama periode ini, industri tekstil tumbuh pesat dan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor tekstil Indonesia.

Tabel 2.1 Sistem Ekonomi yang Pernah di Pakai di Indonesia

Masa Pemerin tahan	Sistem Ekonomi yang Dipakai	Kelebihan	Kekurangan	Permasalah an yang Timbul
Orde Lama	Sosialis	Adanya kepercayaan diri bangsa Indonesia akan kekuatan yang dimilikinya. Kemandirian Ekonomi.	Kurang diminatnya Indonesia sebagai tempat investasi asing. Terhentinya dana asing.	Penyatuan semua mata uang dan di terbitkan mata uang baru, pengguntingan uang
Orde Baru	Sistem Ekonomi pada masa ini lebih ke kapitalistik, di mana Indonesia mulai terbuka dengan dunia Internasional.	Investor asing mulai mau menanamkan modal di Indonesia lebih berkembang dalam hubungan Bilateral dan Multilateral.	Pembangunan ekonomi sangat tergantung kepada utang luar negeri sebagai soko guru. Bertambahnya kesenjangan sosial, karena perbedaan pendapatannya yang tidak merata antara kaya dan miskin	Dari masa ini muncullah budaya KKN yang hingga kini makin meluas, dan juga masa krisis multidimensi yang di mulai dari devaluasi nilai Bath Thailand dan Peso Filipina yang merambat hingga negara Asia termasuk Indonesia Penyelesaian utang Luar negeri Gerakan

Masa Pemerin tahan	Sistem Ekonomi yang Dipakai	Kelebihan	Kekurangan	Permasalah an yang Timbul
				reformasi 1998
Orde Reformasi	kerakyatan Pancasila tapi lebih condong ke arah Kapitalistik,dengan ideologi liberalisme.	Persaingan usaha yang terbuka(bebas) Kerja sama dengan luar negeri makin terbuka	Maraknya kenaikan harga pokok, karena faktor kesepakatan Multilateral dan kondisi pasar dunia. Adanya kesenjangan kelas sosial di masyarakat. Adanya pemupukan modal dan akumulasi di masyarakat.	Permasalahan yang timbul pada sistem ekonomi di era reformasi adalah perdagangan bebas negara ASEAN dan China (ACFTA) Dari sini timbul persaingan yang tidak sama kuat antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha dari Luar yang notabene merupakan para industri besar

(Hermanto, Bambang, 2019)

2. Permasalahan Ekonomi Kontemporer Di Indonesia

Perekonomian Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, terus menghadapi sejumlah permasalahan kontemporer yang mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonominya. Di tengah laju perubahan global yang semakin cepat, pemahaman yang mendalam tentang tantangan-tantangan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, permasalahan utama yang terus mewarnai peta ekonomi Indonesia adalah kesenjangan ekonomi yang meruncing, pengangguran yang tinggi, serta ketergantungan yang masih kuat pada sektor sumber daya alam.

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah terjadi, dampaknya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak orang masih hidup dalam kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah juga menjadi masalah serius.

Tingkat pengangguran, khususnya di kalangan pemuda, adalah masalah lain yang signifikan. Dengan populasi muda yang besar, Indonesia harus menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus bertambah. Pelatihan keterampilan dan investasi dalam industri-industri yang berpotensi besar untuk pertumbuhan pekerjaan menjadi penting untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain itu, ketergantungan pada sektor sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan batu bara, juga menjadi risiko. Harga komoditas yang fluktuatif dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional, dan ada kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi agar lebih tahan terhadap perubahan pasar global.

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan ini, pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan terus bekerja keras. Reformasi ekonomi, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, serta dukungan terhadap sektor-sektor non-minyak dan gas adalah langkah-langkah yang sedang diambil untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan. Dengan pemahaman mendalam tentang permasalahan ekonomi kontemporer ini, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1 Ekonomi Indonesia Dan Permasalahannya (Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 7, No. 1, Maret 2021)

Banurea, dalam jurnal akuntansi manajemen dan Madani, menyebutkan beberapa permasalahan ekonomi yang di terjadi di Indonesia.

1. Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2019 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi global yang mencatat pertumbuhan terendah dalam 10 tahun terakhir, hanya mencapai 2,3 persen. Penurunan pertumbuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur global, yang dipengaruhi oleh perselisihan perdagangan yang berkepanjangan antara dua

negara adidaya, Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, pertumbuhan yang melambat juga terkait dengan gejolak keuangan dan peningkatan ketegangan geopolitik.

Sementara itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan terus berkembang dengan segala manfaat dan risikonya. Melambatnya perekonomian global juga telah meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia, yang pada gilirannya mempengaruhi arus modal global. Secara keseluruhan, berbagai dinamika ini berdampak pada penurunan arus modal asing ke negara-negara berkembang dan menimbulkan tekanan pada banyak mata uang negara berkembang.

Namun, di tengah kondisi perekonomian global yang menurun, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran angka lebih dari 5 persen pada tahun 2019. Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong kredit sebagai sumber pembiayaan.

Salah satu contoh konkret dari dampak perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah pengenaan tarif impor tambahan oleh kedua negara terhadap sejumlah besar barang, yang mengganggu aliran perdagangan global. Selain itu, digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam cara bisnis dan keuangan di Indonesia beroperasi, dengan kemunculan fintech dan e-commerce sebagai pemain utama dalam perekonomian digital.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022



(Badan pusat statistik, 2023)

2. Masalah Pengangguran

Pengangguran merujuk pada situasi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja berkeinginan untuk bekerja tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan. Untuk memberikan contoh, seorang ibu rumah tangga yang sengaja tidak bekerja karena fokus pada tugas mengurus keluarganya biasanya tidak dianggap sebagai pengangguran. Demikian pula, seorang individu dari keluarga kaya yang memilih untuk tidak bekerja karena gaji yang ditawarkan lebih rendah dari tingkat yang dianggap cukup, juga biasanya tidak dianggap sebagai pengangguran. Mereka yang secara sukarela memilih untuk tidak bekerja seperti dalam contoh-contoh ini disebut sebagai pengangguran sukarela.

Faktor utama yang menjadi penyebab pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha akan memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan, yang hanya dapat diperoleh jika mereka dapat menjual barang yang diproduksi. Peningkatan dalam produksi barang dan jasa akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan erat antara pendapatan nasional yang dicapai dan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian.

Sebagai contoh, selama masa pandemi COVID-19, banyak sektor ekonomi mengalami penurunan produksi dan penjualan, yang mengakibatkan pengusaha harus membatasi penggunaan tenaga kerja atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat secara signifikan di berbagai negara karena rendahnya permintaan konsumen dan gangguan dalam rantai pasokan global. Banyak individu yang sebelumnya bekerja sekarang berada dalam situasi pengangguran yang tidak mereka inginkan.

Tabel 2.3 Karakteristik Pengangguran

Karakteristik Pengangguran	Februari 2021 (persen)	Februari 2022 (persen)	Februari 2023 (persen)	Perubahan Feb 2021–Feb 2022 (persen poin)	Perubahan Feb 2022–Feb 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,26	5,83	5,45	-0,43	-0,38
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	6,81	6,31	5,83	-0,50	-0,48
- Perempuan	5,41	5,09	4,86	-0,32	-0,23
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,00	7,61	7,11	-0,39	-0,50
- Perdesaan	4,11	3,72	3,42	-0,39	-0,30
TPT Menurut Kelompok Umur					
- 15–24 tahun	18,03	17,08	16,46	-0,95	-0,62
- 25–59 tahun	4,57	4,29	3,95	-0,28	-0,34
- 60 tahun ke atas	1,29	1,22	1,13	-0,07	-0,09

(Badan pusat statistik, 2023)

3. Masalah Kenaikan Harga-harga (Inflasi)

Inflasi adalah permasalahan ekonomi yang terjadi akibat kenaikan tingkat harga secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam istilah sederhana, hal ini menggambarkan kenaikan harga-harga dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Kenaikan harga yang berkelanjutan seperti ini dapat menghambat perekonomian dalam mencapai stabilitasnya. Inflasi dapat berdampak pada peningkatan rata-rata harga barang dan jasa.

Saat terjadi inflasi, harga-harga pada umumnya mengalami kenaikan, walaupun beberapa barang mungkin mengalami kenaikan harga di bawah rata-rata. Kenaikan harga-harga ini dapat mempengaruhi produktivitas dan menaikkan beban biaya produksi, yang selanjutnya dapat memicu peningkatan harga barang dan jasa yang diproduksi. Inflasi bisa terjadi dalam berbagai jenis dan dapat memengaruhi harga-harga berbagai jenis barang dan jasa.

Inflasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dalam perekonomian suatu negara dalam periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat berbeda dari satu periode ke periode berikutnya dan juga bervariasi antara negara-negara. Tingkat inflasi dapat rendah, biasanya sekitar 2-3 persen, moderat dengan kisaran 4-10 persen, atau bahkan sangat tinggi mencapai beberapa puluh, ratusan, atau bahkan ribuan persen dalam satu tahun (yang disebut sebagai hiperinflasi).

Contohnya adalah selama masa pandemi COVID-19, banyak negara mengalami tekanan inflasi. Hal ini terjadi karena gangguan dalam rantai pasokan global, peningkatan biaya produksi, dan perubahan perilaku konsumen. Misalnya, krisis pasokan yang disebabkan oleh penutupan pabrik atau penghentian produksi selama lockdown dapat menyebabkan kenaikan harga bahan mentah. Selain itu, permintaan untuk barang tertentu, seperti produk-produk kesehatan atau perlengkapan kerja dari rumah, dapat meningkat tajam, yang juga dapat mendorong kenaikan harga.

Tabel 2.4 Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Inflasi

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2022	IHK Desember 2022	IHK Juni 2023	Tingkat Inflasi m-to-m Juni 2023 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Juni 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Juni 2023 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Juni 2023 (%)	Andil Inflasi y-on-y Juni 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (<i>Headline</i>)	111,09	113,59	115,00	0,14	1,24	3,52	0,14	3,52
Makanan, Minuman, dan Tembakau	118,27	117,82	121,64	0,39	3,24	2,85	0,10	0,76
Pakaian dan Alas Kaki	107,66	108,48	109,24	0,08	0,70	1,47	0,00	0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	105,33	107,54	107,95	0,10	0,38	2,49	0,02	0,48
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	112,32	113,90	115,21	0,08	1,15	2,57	0,00	0,16
Kesehatan	111,27	112,75	114,14	0,23	1,23	2,58	0,01	0,07
Transportasi	108,74	120,61	119,81	-0,10	-0,66	10,18	-0,01	1,23
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,82	99,64	99,59	0,00	-0,05	-0,23	0,00	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106,70	108,26	109,02	0,12	0,70	2,17	0,00	0,04
Pendidikan	109,62	112,45	112,63	0,01	0,16	2,75	0,00	0,15
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,42	115,44	117,13	0,22	1,46	3,27	0,02	0,29
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118,13	120,72	123,17	-0,04	2,03	4,27	0,00	0,27

Keterangan:

¹⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Mei 2023²⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Desember 2022³⁾ Persentase perubahan IHK Juni 2023 terhadap IHK Juni 2022

(Badan pusat statistik, 2023)

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2023, antara lain: beras, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan segar, rokok putih, rokok kretek, rokok kretek filter, kontrak rumah, sewa rumah, bahan bakar rumah tangga, tarif listrik, upah asisten rumah tangga, mobil, bensin, solar, tarif angkutan antar kota, tarif angkutan dalam kota, uang kuliah akademi/PT, dan emas perhiasan. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat, cabai hijau, bayam, kol putih/kubis, minyak goreng, dan telepon seluler.

4. Masalah Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

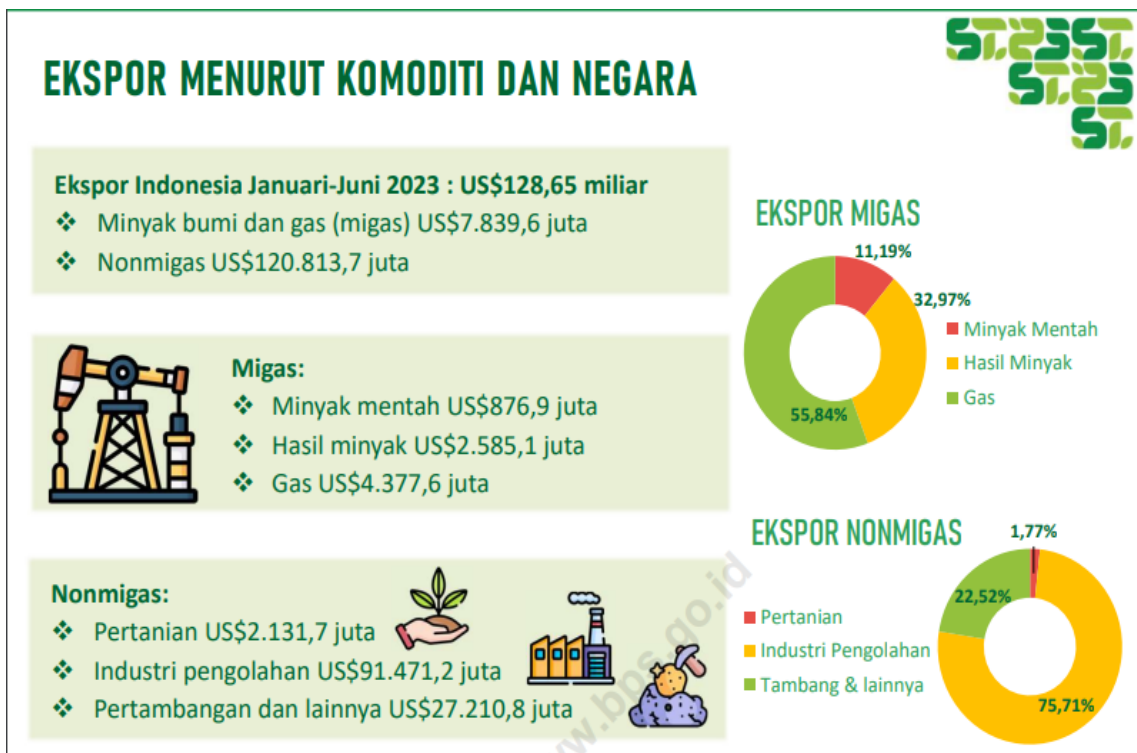
Kegiatan ekspor dan impor adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Konsep ekonomi terbuka mengacu pada hubungan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara dengan negara-negara lain, terutama melalui kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, aliran modal untuk investasi juga berlangsung di antara negara-negara tersebut. Para ahli ekonomi klasik telah lama menggarisbawahi bahwa perdagangan internasional memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk memperluas operasi

mereka, sementara impor dapat memberikan sumbangan penting terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memungkinkan industri-industri untuk mengimpor mesin dan bahan baku yang mereka perlukan.

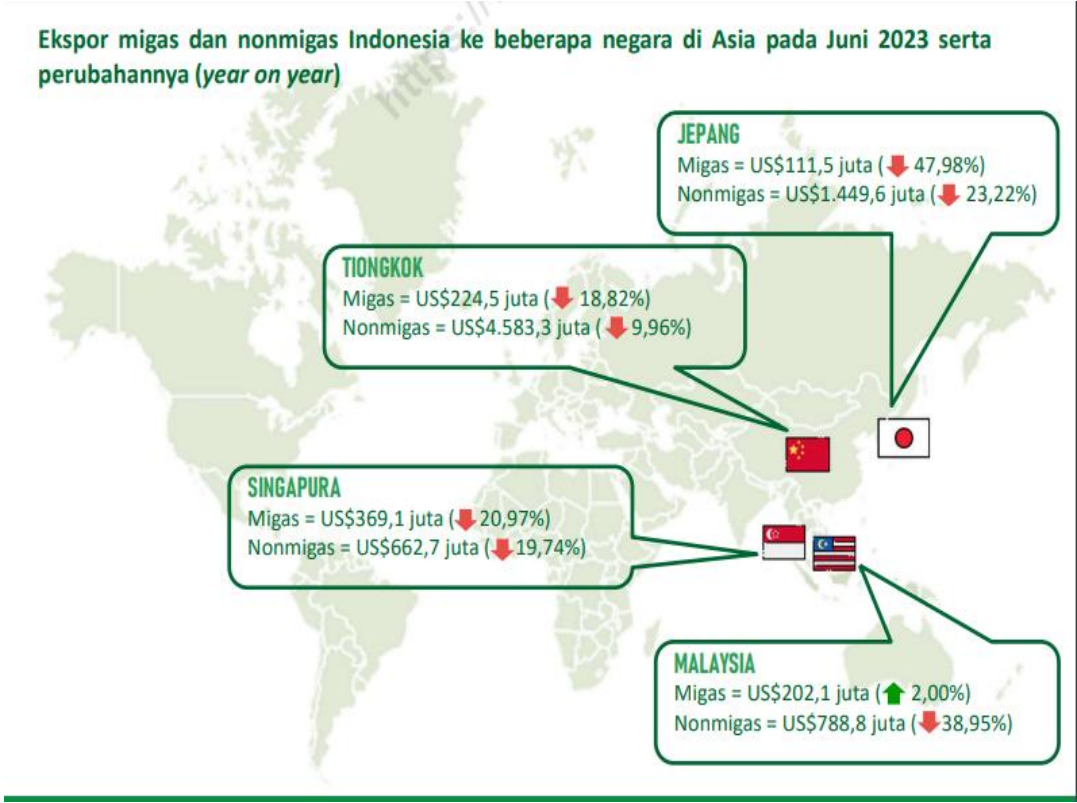
Sebagai contoh, Indonesia adalah produsen berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, karet, dan produk pertambangan seperti batu bara dan minyak mentah. Indonesia melakukan ekspor banyak dari produk-produk ini ke berbagai negara di seluruh dunia. Contohnya, minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor utama Indonesia dan banyak diekspor ke berbagai negara, termasuk India dan Tiongkok. Ini menciptakan aliran ekspor yang signifikan dan memberikan sumbangan penting terhadap pendapatan ekspor Indonesia.

Indonesia juga menerima aliran modal masuk dari luar negeri dalam bentuk investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) dan investasi portofolio. Contohnya, sejumlah perusahaan asing telah berinvestasi di sektor manufaktur dan energi Indonesia. Mereka membuka pabrik atau fasilitas produksi di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada aliran modal portofolio yang masuk ke pasar saham dan obligasi Indonesia oleh investor asing.

Kedua contoh ini mencerminkan pentingnya ekspor dan investasi asing dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain serta dampaknya terhadap neraca perdagangan dan neraca pembayaran negara ini.



Gambar 2.1 Ekspor Menurut Komoditi dan Negara



Gambar 2.2 Ekspor Migas Dan Nonmigas Indonesia

Ekspor Indonesia selama Januari-Juni 2023 mencapai volume 336.091,3 ribu ton dengan nilai US\$128.653,3 juta, yang terdiri dari US\$7.839,6 juta hasil ekspor minyak bumi dan gas serta US\$120.813,7 juta ekspor komoditas nonmigas.

Tabel 2.5 Total Nilai Ekspor Indonesia Selama Juni 2023

Tahun/Bulan	Migas				Nonmigas	Total	
	Minyak Mentah	Hasil Minyak	Gas	Total			
Berat Bersih (000 Ton)							
2022	Juni	1 253,3	1 932,2	512,1	3 697,6	12 151,6	15 849,2
	Juli	1 961,6	2 097,6	562,0	4 621,2	10 485,1	15 106,3
	Agustus	1 306,8	2 281,1	695,4	4 283,3	12 041,4	16 324,7
	September	1 454,2	2 250,6	467,1	4 171,9	11 201,3	15 373,2
	Oktober	1 486,3	2 434,8	553,2	4 474,3	10 610,9	15 085,2
	November	1 184,4	1 988,9	605,0	3 778,3	11 205,5	14 983,8
	Desember	1 366,8	2 436,6	552,2	4 355,6	13 089,6	17 445,2
2023	Januari	1 587,5	2 198,4	554,4	4 340,3	10 957,5	15 297,8
	Februari	870,7	1 978,0	554,4	3 403,1	9 954,8	13 357,9
	Maret	1 324,9	2 288,4	566,8	4 180,1	13 158,4	17 338,5
	April	1 252,4	2 335,1	656,7	4 244,2	9 654,6	13 898,8
	Mei	1 934,6	2 128,9	649,6	4 713,1	14 056,3	18 769,4
	Juni	1 176,9	1 806,6	514,9	3 498,4	11 187,0	14 685,4
Nilai CIF (Juta US\$)							
2022	Juni	1 008,7	2 274,6	389,7	3 673,0	17 330,9	21 003,9
	Juli	1 686,7	2 363,1	405,5	4 455,3	16 889,7	21 345,0
	Agustus	1 083,8	2 157,4	460,2	3 701,4	18 449,2	22 150,6
	September	1 120,8	2 011,0	294,3	3 426,1	16 382,2	19 808,3
	Oktober	1 038,1	2 012,0	314,0	3 364,1	15 771,3	19 135,4
	November	841,5	1 618,2	344,5	2 804,2	16 157,9	18 962,1
	Desember	949,2	1 896,8	355,0	3 201,0	16 662,1	19 863,1
2023	Januari	967,0	1 627,5	311,6	2 906,1	15 536,8	18 442,9
	Februari	528,1	1 494,0	384,4	2 406,5	13 512,7	15 919,2
	Maret	814,2	1 809,1	391,5	3 014,8	17 573,3	20 588,1
	April	780,3	1 801,5	373,2	2 955,0	12 393,6	15 348,6
	Mei	1 184,6	1 601,3	349,2	3 135,1	18 144,5	21 279,6
	Juni	672,3	1 319,9	230,1	2 222,3	14 928,2	17 150,5

Total nilai impor Indonesia selama Juni 2023 mencapai US\$17.150,5 juta, turun US\$4.129,1 juta (19,40 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Impor berasal dari minyak dan gas (migas) US\$2.222,3 juta dan non-minyak dan gas (nonmigas) US\$14.928,2 juta atau masing-masing memberikan peranan 12,96 dan 87,04 persen. Dari sisi volume, secara agregat juga mengalami penurunan 21,76 persen menjadi 14.685,4 ribu ton. Secara keseluruhan, volume impor migas mencapai 3.498,4 ribu ton (23,82 persen) dan nonmigas 11.187,0 ribu ton (76,18 persen).

C. RANGKUMAN

Dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, berbagai komunitas telah mengembangkan berbagai pendekatan yang sesuai dengan sistem ekonomi yang mereka anut. Sistem ekonomi, dalam konteks ini, mengacu pada cara suatu masyarakat mengelola aspek ekonomi mereka. Ini mencakup aturan, peraturan, dan norma-norma yang digunakan dalam mengatur aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi.

Sistem Ekonomi di Indonesia Sejak Jaman Dahulu Sampai Sekarang:

4. **Ekonomi Tradisional (Pra-Kolonial):** Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Indonesia memiliki sistem ekonomi tradisional berbasis pertanian, perikanan, dan perdagangan lokal. Komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan hasil pertanian diperdagangkan dalam skala regional dan internasional.
5. **Pengaruh Kolonialisme:** Saat Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda, sistem ekonomi berubah drastis. Kolonialisme Belanda mengarah pada eksploitasi sumber daya alam, seperti karet, kopi, dan minyak kelapa sawit, untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Ini menyebabkan penindasan ekonomi Indonesia.
6. **Kemerdekaan dan Ekonomi Terpimpin (1950-1960-an):** Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi terpimpin yang didasarkan pada sosialisme. Pemerintah memiliki kendali besar atas sektor ekonomi, dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Namun, ekonomi ini mengalami tantangan.
7. **Orde Baru (1966-1998):** Pemerintahan Soeharto mengadopsi model ekonomi berbasis pasar bebas yang dikenal sebagai "Pancasila Ekonomi." Ini meliberalisasi sektor ekonomi, mendorong investasi asing, dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun juga terjadi ketidaksetaraan.
8. **Reformasi Ekonomi (1998-Sekarang):** Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi ekonomi. Negara tetap menjalankan sistem pasar bebas, tetapi dengan lebih banyak transparansi dan regulasi. Hal ini membawa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan sosial dan masalah lingkungan.

Sistem ekonomi Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Saat ini, Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan sektor-sektor seperti manufaktur, pertanian, teknologi, dan pariwisata menjadi komponen penting dalam perekonomian.

D. TUGAS/LATIHAN SOAL

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran dan sebutkan contoh-contoh implementasinya di Indonesia.
2. Analisis dan jelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pasar dalam konteks ekonomi pasar bebas.
3. Deskripsikan kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Mengapa ini menjadi permasalahan serius?
4. Berikan argumen pribadi tentang bagaimana merumuskan solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.